

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Anshari Ritonga, 2017, *Tinjauan Hukum Pajak sebagai Ilmu Khusus*, Pustaka El Manar, Jakarta.
- A. Anshari Ritonga, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, Pustaka El Manar, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso.2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Ke-23, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar, Mukti, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadi Irawan, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2006, *Pengantar Hukum Pajak – Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Rimsky K. Judisseno, 2005, *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.
- S.R. Soemarso, 2007, *Perpajakan – Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta,
- Simon Nahak, 2014, *Hukum Pidana Perpajakan Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Setara Press, Jakarta.

- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia – Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Soemarso, S.R, 2007, *Perpajakan – Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Suryohadi Djulianto, 2015, *Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak*, Modul Pembelajaran Universitas Terbuka.
- Syahrin Mahmud, 2012, *Problematika Penerapan Delik Formal Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas Subsidiaritas*. CV Mandar Maju, Jakarta.
- Waluyo, 2009, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta. .
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Yoserwan, 2021, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Artikel/Jurnal

- Agus Puji Priyono dan Antonia Intarti, 2019, “Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikaitkan Dengan Asas *Ultimum Remedium*”, Jurnal Ilmu Hukum XVIII, Vol 18 No 1.

Emmilia Rusdiana, 2022, “Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, Jurnal Suara Hukum”, Vol 4 No 1.

Mas Putra Zenno Januarsyah, 2017, “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3.

Sarah Hasibuan, 2015, “Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak”. USU Law Journal. Vol. 3 No. 2,

Sherly Rivani dan Charoline Cheisviyanny, 2023, “Respon Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)”. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol. 5, No 1.

Trihadi Waluyo, 2018, *Pemeriksaan Atau Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*, Jurnal Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara Vol 1 No 1.

Trihadi Waluyo, 2020, *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai Se-15/Pj/2018*, Jurnal BPPK.

Wirawan B. Ilyas, 2011, “Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak”. *Jurnal Hukum*, Vol.18 No. 4.

Yoserwan, 2020, *Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 20 No. 2, hlm 168.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 162/PID.SUS/2023/PT JMB. Jambi. 5 September 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Surat Edaran Nomor SE-29/PJ/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

D. Skripsi

Resika Puji Rahayu, 2015, “Pengaruh Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan).” Universitas Brawijaya.

E. Situs

Cantika Adinda Putri, 2021, “Dirjen: Orang RI Memilih Dipenjara Ketimbang Bayar Pajak!”, diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 13.39 WIB.

Kata Data, 2023, “Pendapatan Negara Rp2.626 Triliun pada 2022, Mayoritas dari Pajak”, diakses pada 22 oktober 2023, pukul 19.48.

Mochammad Fadhil, 2022, “Mengenal Account Representative (AR) Pajak”

<https://klikpajak.id/blog/account-representative-pajak/>, diakses 5 Januari

Pukul 09.00 WIB.

Ruben Achmad, “Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan”. Jurnal

Doctrinal, <https://jurnal.umpalembang.ac.id/doktrinal/article/view/385>,

diakses 10 Oktober, pukul 20.30.

